

DAFTAR PUSTAKA

- Absori dkk, 2018, *The Formulation of Welfare State: The Perspektif of Maqasid al-Shari'ah*, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 8, No. 1 2018, pp. 117-146.
- Absori, 2014, "*Hukum Penyelesaian Sengketa: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Perspektif Partisipatif*", Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Absori dan Nunik Nurhayati, 2017, *Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi*, Jurisprudence, Vol. 7.
- Absori, 2005, "*Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Alfitri, Volume 9 Nomor 3, September 2012, "*Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*", Jurnal Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, www.jimly.com, ditakses tanggal 24 November 2020 Pukul 11:30 WIB.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Budiyono DKK, "*Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 67, Tahun XVIII Desember 2015.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absori, "*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, (Juni, 2019).
- Erika, "*Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat*," *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No.1, (Junit, 2018).

- FX. Adji Samekto, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbau Theory dalam Pendekatan Normatif Filosofis*, Jurnal Hukum Progresif, 7.1 (2019).
- Hakim, Lukman, dkk, “Pertambangan dan Kemiskinan Struktural Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Masyarakat Desa Sarakaman, Pulau Sebuk, Kotabaru, Kalimantan Selatan)”, *Jurnal Sodality*, Vol. 3, No.1, (2015), Bogor: IPB.
- Hartana, Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah,”*Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2017).
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jayus, Jaja Ahmad, 2001, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi dalam Implementasi Otonomi Daerah*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, UNPAR, Bandung.
- Jaja, Ahmad Jayus, 2001, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi dalam Implementasi Otonomi Daerah*, Tesis, Bandung: Program Pasca sarjana Ilmu Hukum UNPAR.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, (Juni, 2012).
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Manan, Bagir, 1990, “*Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*”, Disertasi: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Maulana, Rifqy, *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*, Makalah Lepas.
- Philipus M. Hadjon et.al, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus, M. Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putri, Edwia, *Perijinan dalam Hukum Administrasi Negara*, Artikel Ilmiah, Universitas Sriwijaya, FISIP.

- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. M. A. B. Kusuma, 2006, *Negara Kesejahteraan Dan Jaminan Sosial*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 1, Mahkamah Konstitusi.
- Rizkyana ZP dan Lita Tyesta A.L.W, 2015, *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Universitas Diponegoro.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saptomo, Ade, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo.
- Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Edisi 1, Cetakan Ketujuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solechah, Siti Nur, *Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan*, Jurnal Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri, Vol IV, No. 12/II/P3DI/Juni/2012, DPR RI.
- Sulistiyani Eka dan Hardianto, "Urgensi Hukum Perijinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48 (2).
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukmana, Oman, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*),” *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No.1, (Juli-Desember, 2016).
- Sudrajat, Nandang, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suharto, Edi, 2006, *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*, Makalah Seminar UGM, www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos .
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suyartono, dkk, 2003, *Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Semarang: Studi Nusa Edisi Empat .
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*.
- V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya,” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, No.1, (Agustus, 2020).
- Widayati, Absori, & Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 2 Desember 2014.
- Wibisana, A. G. (2017). “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (*Economic Analysis Of Law*)”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47 (2).
- Wijoyo, S. (2012). “Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Yuridika*, 27 (2).
- Yuwono, Benny, Narumi, “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup, “*Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No.1, (Oktober, 2019).
- Indah Cintia, dkk, *Urgensi Komparasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah*, <https://www.researchgate.net/publication/325473140> diakses pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 20:14 WIB.

Verda Nano Setiawan , 2020, *Kotak Pandora Beralihnya Kewenangan Izin Tambang ke Pusat*, <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5fd36ce78689a/kotak-pandora-beralihnya-kewenangan-izin-tambang-ke-pusat>. Diakses tanggal 17 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.